

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Tema-tema yang berkaitan dengan implikasi globalisasi akhir-akhir ini semakin marak dibicarakan oleh masyarakat. Banyak hal menarik yang dapat dicermati berkaitan dengan globalisasi. Dalam artikelnya di *Foreign Affairs* (1993) yang berjudul *The Class of Civilization* (dibukukan dengan judul yang sama), Samuel .P. Huntington berpendapat bahwa perang masa depan tidak lagi perang antara negara-negara nasional atau perang antara kekuatan-kekuatan modal, tetapi perang antar kultur dan antar peradaban. Hal ini dikarenakan dengan diimplementasikannya globalisasi, batas-batas negara nasional dan batas-batas kekuatan modal akan kabur dengan sendirinya. Yang masih ada hanyalah batas kultural. Perbedaan peradaban inilah yang akan menjadi medan laga bagi peperangan di masa depan (masa kini). Belum lagi lahirnya konsep-konsep baru yang lahir seiring dengan meningkatnya pembahasan wacana mengenai globalisasi, seperti : konsep masyarakat global, negara global, perdagangan bebas, ekonomi global, etno nasionalisme¹, dan lain-lain, yang notabene masih merupakan konsep asing bagi masyarakat dunia Internasional pada umumnya. Hadirnya konsep-konsep baru ini tak dapat disangkal telah menimbulkan keresahan yang luar

¹ Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, *Global Agenda : Issues and Perspectives*, Random House, New York, 1984.

biasa bagi masyarakat dunia, terutama konsep-konsep yang berkaitan dengan perekonomian secara global.

Dengan berakhirnya Perang Dingin yang berlangsung kurang lebih selama 50 tahun antara komunisme ala Soviet dan Demokrasi Liberal Barat, beberapa peneliti -terutama Francis Fukuyama- menyatakan bahwa kita telah mencapai "akhir sejarah". Tidak ada yang bisa digali lebih jauh dari kebenaran. Kenyataannya, kini konfrontasi Ideologis menyakitkan yang diletuskan oleh bentrokan "isme-isme" abad ini telah berakhir, semakin banyak jumlah masyarakat dari semakin banyak belahan dunia ketimbang sebelumnya yang secara agresif ingin *berpartisipasi* dalam sejarah. Selama berabad-abad, bahkan beribu-ribu tahun, mereka telah meninggalkan di belakang mereka kebingungan di hutan rimba, gurun dan isolasi di daerah pedesaan untuk menghindar dari komunitas dunia -dan dari ekonomi global yang mengikatnya bersama- sebuah kehidupan yang beradab bagi diri mereka sendiri dan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Satu generasi yang lalu, bahkan satu dekade yang lalu, sebagian besar dari mereka sama tak bersuaranya dan sama tak tampaknya seperti adanya mereka sejak dulu. Ini tidak benar lagi: mereka telah memasuki sejarah dengan sebuah pembalasan, dan mereka memiliki tuntutan-tuntutan - tuntutan-tuntutan ekonomi- yang harus dipenuhi. Dalam kaitannya dengan tema yang penulis ambil dalam skripsi ini, penulis akan lebih memfokuskan dua dari konsep empat "I" Kenichi Ohmae (Investasi, Industri, Informasi dan Individu), yaitu Investasi dan Industri yang akan dipandang melalui perspektif-kacamata ekonomi global

Apabila kita membicarakan masalah Investasi dengan perspektif pandangan ekonomi global, sangat menarik untuk dibahas ketika kita menemukan kenyataan pada saat ini bahwa Investasi tidak lagi dibatasi secara geografis. Kini, dimanapun kita tinggal di dunia, kesempatan untuk mendapatkan Investasi menjadi sangat memungkinkan dan menarik, dan uangpun akan terus masuk. Lagi-lagi, sepuluh tahun lalu, aliran dan lintas batas antar negara terutama hanya dari pemerintah ke pemerintah atau dari agen peminjaman multilateral ke pemerintah. Ada seorang walikota dan pejabat birokrat publik pada sedikitnya sebuah akhir transaksi. Kini, hal itu tidak lagi terjadi karena uang yang sekarang bergerak melampaui batas-batas adalah milik pribadi, pemerintah tidak lagi harus terlibat dalam setiap akhir transaksi. Yang menjadi persoalan adalah kualitas dari kesempatan berinvestasi. Uang akan pergi dimana ada kesempatan-kesempatan yang baik².

Kabupaten Kotawaringin Timur yang terletak di Propinsi Kalimantan Tengah, sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang dengan pesat secara ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan perkembangan Daerah di wilayah ini, ditambah lagi dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah di daerah ini. Namun, konflik etnis Dayak-Madura yang terjadi di Sampit pada 18 Februari 2001 telah memporak-porandakan segalanya, termasuk aspek roda perekonomian masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. Runtuhnya kepercayaan dunia

² Kenichi Ohmae, "The Mixed Scorecard of Japanese Management Abroad: Backlash is Mounting among Companies that Query How Exportable are Japanese Ways," *International Management*, July 1992

luar (para investor asing) semakin mempersulit keadaan ini. Selama hampir 2,5 tahun semenjak tragedi tersebut berlalu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masih mengalami kesulitan untuk memulihkan citra daerah ini untuk kembali mendapatkan kepercayaan dunia luar. Kini, dengan gagasan strategi dan kebijakan baru, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berusaha untuk melanjutkan usaha tersebut. Hal inilah yang bagi penulis sangat menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Disamping itu, tugas akhir penulisan skripsi ini juga penulis harapkan dapat menjadi persembahan dan kontribusi yang berarti bagi kota tempat penulis lahir, tumbuh dan berkembang tersebut. Dalam konteks ini penulis mengambil tema dalam penulisan skripsi ini dengan judul :

“Peluang Investasi di Kabupaten Kotawaringin Timur Pasca Konflik Etnis 2001: Sebuah Strategi Dalam Menghadapi Pasar Global”

B. TUJUAN PENULISAN

Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengelaborasi strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam usahanya untuk menarik masuknya investor asing dalam menghadapi era globalisasi dalam konteks globalisasi ekonomi pasca konflik etnis yang terjadi pada 18 Pebruari 2001 yang lalu.
2. Untuk membuktikan bahwa situasi ekonomi, politik dan keamanan di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah dapat distabilisasi sehingga

dapat mengembalikan kepercayaan dunia luar (investor asing) terhadap Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Untuk menarik minat para investor asing untuk berinvestasi di Kotawaringin Timur.
4. Sebagai prasyarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada saat ini banyak sekali wacana yang sering sekali membahas mengenai globalisasi. Akan tetapi pada kenyataannya, seiring dengan berjalannya waktu, globalisasi sendiri tidak hanya berupa sebuah wacana semata, melainkan muncul di tengah permukaan masyarakat sebagai sebuah fenomena yang benar-benar terjadi.

Dinamika dari fenomena ini ditandai oleh kemajuan luar biasa pesatnya di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), terutama Teknologi Komunikasi dan Informasi yang dipelopori oleh negara-negara maju, sehingga berakibat pada batas-batas negara menjadi kabur (*borderless*). Hal ini sesuai dengan pendapat Anthony Giddens yang menyatakan bahwa globalisasi dapat diidentifikasi sebagai “Pengintensifan Hubungan Sosial Dunia” dengan mempersempit jarak (menjadikan satu lokal) sehingga apa yang terjadi di suatu tempat, meski jauh sekalipun, juga akan diketahui secara mudah di belahan bumi yang lain. Dunia terasa kian

Perkembangan Teknologi Informasi yang dahsyat sebagai akibat dari Revolusi Teknologi dan Informasi tersebut, ternyata juga berpotensi mempengaruhi perilaku manusia dan merombak segala bentuk sistem kehidupan dari bentuk yang selama ini dipandang dan dianut masyarakat dunia terutama di belahan bangsa-bangsa yang menganut budaya Timur dan negara-negara Dunia Ketiga -termasuk Indonesia- sebagai sebuah sistem hidup yang dijalani menjadi bentuk baru dari sistem kehidupan itu sendiri yang dituntut untuk lebih berkembang, maju, dan kompetitif seperti yang terjadi pada kultur Barat yang berbasis pada kapitalisme yang merupakan pelopor gerakan globalisasi sendiri.

Keterlibatan Indonesia dalam era globalisasi terutama globalisasi ekonomi yang ditandai dengan implikasi liberalisasi perdagangan, industri dan investasi yang tidak lagi dapat dibatasi oleh batas-batas geografis negara tidak bisa dihindarkan. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap harus kita hadapi.⁵ Di Indonesia, secara kebetulan dimulainya era globalisasi ini ditandai pula dengan masa transisi demokrasi serta berlakunya Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Dengan dua piranti Undang-Undang ini sangat jelas bahwa orientasi kebijakan pembangunan sepenuhnya diberikan kepada masing-masing daerah. Karena itu dominasi pusat semakin kecil dan era sentralistik kemudian berganti menjadi desentralistik. Dari aspek ekonomi

dan bisnis, pergeseran paradigma yang paling fundamental' adalah kian melemahnya peranan dan intervensi pemerintah di bidang ekonomi.

Karenanya, Futurolog John Naisbitt menambahkan, perubahan lingkungan pasar yang terjadi akhir-akhir ini, memaksa sejumlah besar badan usaha untuk melakukan transformasi visi, misi, strategi yang diadaptasikan ke dalam struktur, kultur dan sistem organisasi. Hal semacam ini adalah fenomena umum yang bakal dihadapi dunia, termasuk di daerah Kotawaringin Timur, tentunya dalam lingkup yang lebih kecil.

Dalam konteks menghadapi era perdagangan bebas AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada tahun 2003 yang lalu, Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat harus mempersiapkan diri agar tidak tertinggal dan menjadi pasar empuk bagi negara-negara lain. Semuanya ini merupakan langkah menuju ke arah globalisasi ekonomi 2020. Beberapa langkah telah diambil dalam rangka AFTA ini antara lain perluasan cakupan kerjasama. Diharapkan efisiensi dapat meningkat guna menghadapi persaingan yang lebih maju.

Di era globalisasi ini, batas-batas negara (dalam arti ekonomi) sudah tidak memiliki makna dan fungsi yang penting lagi. Barang dan jasa dapat bebas keluar masuk semua negara. Karena Indonesia telah ikut meratifikasi kesepakatan WTO (World Trade Organization) yang isinya diantaranya yaitu produsen bebas masuk ke suatu negara, setiap orang atau konsumen bebas memiliki barang dan jasa termasuk dari luar negeri. Maka kita tidak

Sebenarnya, hakikat dari globalisasi sebagai suatu kondisi subyektif menunjukkan pada suatu proses dalam kesadaran manusia dimana melihat dirinya sebagai partisipan dalam masyarakat dunia yang makin menyatu. Sementara sebagai kondisi obyektif globalisasi merupakan proses menyempitnya ruang dan waktu, menciutnya dunia yang berkembang dalam kondisi yang penuh paradoks. Paradoks antara universalisasi versus pluralisasi, integrasi versus fragmentasi, sentralisasi versus otonomisasi, kompetisi versus kooperasi dan sebagainya. Ini merupakan gejala global.⁶

Globalisasi yang merasuk ke dalam sendi pergaulan antar bangsa ini telah menumbuhkan wujud persaingan baru yakni persaingan ekonomi yang begitu menonjol sehingga menyebabkan timbulnya konflik-konflik kepentingan dalam bentuk sesuatu yang baru pula. Sebagai jawaban fenomena abad 21, maka isu penting yang mengemuka di era globalisasi ini adalah aspirasi demokratisasi, HAM, keterbukaan, dan lain-lain. Sehingga dalam konteks ini, nyaris semua masalah yang berkembang di suatu negara selalu dikaitkan dengan isu-isu tersebut. Kaitannya dengan liberalisasi ekonomi, negara-negara berkembang tanpa kecuali Indonesia akan beradaptasi dengan ekonomi global, pasar bebas dan transfer modal.

Pasca perang dingin, masalah krusial yang dihadapi oleh masing-masing negara adalah masalah internal seperti masalah SARA, yang pada akhir-akhir ini telah mengakibatkan pecahnya berbagai negara. Negara-negara yang pecah adalah negara yang lemah ketahanan masyarakatnya dan

lemah sistem politiknya sehingga tidak mampu mengelola konflik yang berada di tingkat bawah.

Selain itu, karena ia tidak mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian ekonomi yang diperlukan terhadap kecenderungan pasar bebas. Kelemahan-kelemahan tersebut membuat tidak berfungsinya sistem hukum dan tata tertib yang berdampak terhadap berkembangnya separatisme di daerah yang kemudian dapat memacu dan memicu timbulnya perang saudara atau disintegrasi sosial yang memunculkan konflik horisontal berkepanjangan. Apabila hal ini tidak diwaspadai secara sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin kondisi tersebut akan (telah) terjadi dan akan terulang kembali di Indonesia. Hal ini terbukti pada saat ini banyak sekali terjadi konflik di Indonesia, seperti yang terjadi di Sampit.

Bagi Sampit sebagai ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan Kabupaten yang paling pesat kemajuannya di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, pasca kerusuhan 2001 dan Pemekaran Wilayah tahun 2002 serta berlakunya otonomi daerah, Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan momentum yang tepat untuk berbenah menuju kota bisnis dan jasa. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap, dalam waktu yang tidak lama, Kabupaten yang telah berusia setengah abad ini sudah bisa mandiri. Diakui, membangun citra baru di suatu wilayah yang pernah mengalami konflik horisontal seperti di Sampit bukanlah suatu pekerjaan

mendapat sorotan yang luas dari dunia Internasional. Daerah yang mengalami konflik sudah pasti citranya jatuh yang pada akhirnya berakibat buruk pada kelangsungan daerah itu di masa depan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus berupaya untuk membangun citra daerah ini sebagai daerah yang aman.

Sebelum terjadi kerusuhan, kesiapan Kabupaten Kotawaringin Timur menjalankan otonomi daerah yang merupakan sebuah jawaban dari tantangan era globalisasi ini memang tidak diragukan lagi. Namun apa boleh buat, otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 sontak berantakan. Dalam sekejap, kerusuhan yang menelan ratusan korban jiwa itu telah meluluhlantakan berbagai tanaman ekonomi yang ada, rusaknya fasilitas umum dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur serta terhentinya roda perekonomian masyarakat.

Sesaat memasuki perubahan dunia yang begitu cepat (era globalisasi), kita dihadapkan setidaknya pada dua tantangan besar yaitu tantangan perubahan dari masyarakat agraris menuju kepada masyarakat industri dan tantangan dalam menerima arus perubahan peradaban masyarakat pasca industri.⁷ Kondisi ini pada akhirnya melahirkan berbagai tuntutan baru pada masyarakat dan lingkungannya terhadap perubahan dan penyesuaian paradigma dan praktik administrasi pemerintahan serta pembangunan daerah.

Akibatnya saling ketergantungan menjadi tak terelakan. Sebab menempatkan posisi Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/ Kota)

bagaimana Kabupaten Kotawaringin Timur bekerja keras memantapkan perannya sebagai bandar niaga utama di Kalimantan Tengah. Barangkali kita perlu mencermati bahwa pengalaman negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia yang terlalu mengandalkan Sumber Daya Alam yang berlimpah ternyata tidak dapat bangkit ekonominya pasca krisis moneter bahkan semakin terpuruk dikarenakan krisis ekonomi yang berkepanjangan, sebaliknya negara-negara yang miskin Sumber Daya Alam seperti Singapura tetapi kaya akan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi, negara tersebut sangat maju. Produk barang dan jasa yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang dikehendaki pasar global.⁸

D. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menarik investor asing dalam menghadapi pasar global pasca konflik etnis 2001”.

E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Untuk dapat menjawab permasalahan di atas, maka penulis akan menggunakan Teori Integrasi Internasional, Konsep Kepentingan Nasional dan Konsep Strategi sebagai kerangka dasar pemikiran. Disini penulis

Lokal dan Tantangan Global, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

⁸ Uddin, Jurnalis, *Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad ke-21*, dalam keluar dari

strategi kebijakan yang memberi ruang kondusivitas bagi tumbuhnya peningkatan daya saing baik produk ataupun SDM.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah :

“the fundamental and ultimate deteminant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conceptions of those elements that constitute the state’s most vital needs. They include self preservation, independence, territorial integrity, military security and economic wellbeing”.¹¹

Seiring dengan diimplikasinya globalisasi, maka batas-batas negara secara geografis dapat dikatakan tidak lagi memiliki makna yang berarti. Demikian juga dengan wewenang dan legitimasi pemerintah pusat untuk mengatur hubungan wilayahnya dengan dunia internasional. Hal ini di Indonesia sejalan dengan diimplikasinya konsep otonomi daerah dan diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, disini penulis mencoba untuk lebih mempersempit pemaknaan “Kepentingan Nasional” secara regional agar relevan dengan konteks pembahasan skripsi ini mengingat negara bukan lagi sebagai salah satu aktor utama di dalam hubungan internasional pada era globalisasi ini.

Sesuai dengan pemaparan mengenai definisi konsep kepentingan nasional diatas, kesejahteraan ekonomi termasuk di dalam salah satu kepentingan nasional (regional) yang harus diupayakan dalam konteks globalisasi ekonomi, maka dalam hal ini Pemerintah Kabupaten

¹¹ Jack C. Plano dan Roy Colton, *The International Relations Dictionary* , New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969, hal. 128.

lagi. Salah satu bentuk persaingan ini adalah persaingan di dalam memperoleh dana internasional atau investasi.

Di sisi lain, globalisasi ekonomi itu sendiri merupakan ancaman bagi negara berkembang dan negara-negara kecil lainnya apabila mereka tidak memiliki kemampuan dan daya saing dengan negara maju. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Darwin di dalam teori evolusinya, yaitu : **“The Survival of The Fittest”**, bahwa dengan adanya globalisasi dan liberalisasi perdagangan, sebenarnya negara berkembang memiliki peluang untuk maju dan berkembang asalkan pandai memanfaatkan peluang yang ada.

Untuk mampu bersaing dan bisa memanfaatkan peluang yang ada tersebut, dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Inilah yang disebut dengan strategi. Menurut Hugo. F. Reading, dalam Kamus Ilmu Sosial, strategi adalah: **“Tata cara yang merupakan alternatif untuk berbagai langkah atau perundingan yang bertujuan untuk mengubah batas-batas kekuatan”**¹³, sedangkan menurut Jack. C. Plano, strategi adalah : **“Suatu ancap-ancang untuk mengalahkan lawan atau mencapai tujuan lain”**. Masih menurut Jack C. Plano, strategi biasanya mengacu pada rencana yang menyeluruh atau berjangka panjang yang mencakup serangkaian gerakan yang langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh¹⁴. Kerangka konsep Strategi inilah yang akan penulis coba aplikasikan di dalam eksplorasi mengenai strategi dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Jakarta, Indomedia, 2003, hal. Pengantar.

¹³ Hugo. F. Reading, *Kamus Ilmu Sosial*, Jakarta, CV Rajawali, 1986, hal. 405.

¹⁴ Jack C. Plano, *Strategi*, Jakarta, CV Rajawali, 1986, hal. 100.

dalam usahanya untuk memperoleh investasi dari investor asing, termasuk apa saja langkah-langkah kongkrit kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memperbaiki citra daerah ini (pasca konflik etnis 2001), memperoleh kepercayaan kembali dari para investor asing, dan menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur yang diperlukan untuk menarik para investor asing tersebut agar mau berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

F. HIPOTESA

Berdasarkan sub-bab latar belakang masalah, perumusan masalah dan kerangka dasar pemikiran yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sementara sebagai berikut :

1. Kabupaten Kotawaringin Timur berusaha untuk mengembalikan citra daerah ini dan mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Kabupaten Kotawaringin Timur berusaha untuk dapat bekerja sama dengan pihak investor asing dalam rangka membangun Kabupaten Kotawaringin Timur.

G. METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini bersifat eksplorasi deskriptif dengan studi literatur. Metode yang bersifat eksplorasi deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena realitas. Maka dari itu, dalam penyajian

1.4. peneliti mengumpulkan data-data yang berasal dari berbagai sumber

sekunder berupa buku-buku, koran, jurnal ilmiah daerah, situs-situs internet dan sumber-sumber lain yang terkait untuk mendukung penelitian. Disamping itu, penulis juga menggunakan metode pengumpulan data primer, melalui wawancara dengan beberapa nara sumber yang terkait dengan tema yang penulis ambil. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai bahan eksplorasi dan deskripsi dari fenomena realitas yang terjadi.

H. JANGKAUAN PENELITIAN

Pembatasan ruang lingkup penelitian diperlukan untuk mempersempit fokus penelitian sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tidak terlalu meluas pembahasannya. Penulis membatasi penelitian ini pada konteks globalisasi ekonomi dan investasi asing sebagai implikan dari globalisasi itu sendiri. Adapun jangkauan penelitian ini mengambil latar tempat Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu pasca konflik etnis Dayak-Madura 18 Februari 2001, yang secara kebetulan bersamaan dengan dimulainya masa percobaan penerapan Undang-undang mengenai otonomi daerah sampai dengan sekitar tahun 2004, ketika masa percobaan Undang-undang mengenai otonomi daerah selesai.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan disusun ke dalam lima bab, yang sistematikanya sebagai berikut :

Bab I : Berisi Pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul,

latar belakang masalah, pokok

permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab kedua ini akan memaparkan tentang globalisasi dan segala aspek serta implikasinya. Pembahasan ini akan menguraikan tentang sejarah globalisasi hingga pada bentuk-bentuk implikasi dari globalisasi itu sendiri.

Bab III : Bab ini berisikan tentang sejarah Kabupaten Kotawaringin Timur, berbagai macam potensi, keunggulan dan faktor penunjang yang dapat memajukan Kabupaten ini; berbagai macam hambatan dan kendala yang dialami oleh daerah Kotawaringin Timur; visi, misi, program, serta mengenai peluang investasi di Kotawaringin Timur. Di bab ini penulis juga akan menggambarkan sedikit mengenai keadaan Kabupaten Kotawaringin Timur sebelum terjadi konflik etnis 2001 dalam hal perekonomian dan penanaman modal asing.

Bab IV: Pada bab ini, penulis akan mengeksplorasi mengenai tragedi kerusuhan Konflik etnis Dayak-Madura yang terjadi di Sampit (ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur) pada 18 Februari 2001 serta dampak dari hal tersebut terhadap jalannya roda perekonomian masyarakat dan penanaman modal asing di Kabupaten Kotawaringin Timur

Bab V: Bab ini berisikan tentang bagaimana strategi yang dilakukan

usaha untuk menarik kembali minat para investor asing untuk berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Timur pasca terjadinya konflik etnis 2001 sampai kurang lebih tahun 2004 dalam rangka untuk menjadikan Sampit yang merupakan ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai kota jasa dan perdagangan agar dapat bersaing di era globalisasi.

Bab VI : Kesimpulan dan Penutup.